



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI KETAPANG



Visi

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Ketapang Yang Agung"

Misi

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.*
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.*
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Ketapang.*
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Ketapang.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahuwata'ala karena atas berkat rahmat dan ridha-Nya, Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) telah selesai menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 PN Ketapang, dimaksudkan sebagai media penyampaian informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan PN Ketapang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Substansi dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menginformasikan secara detail program dan kegiatan PN Ketapang dalam Tahun 2023, yang terkait dengan kebijakan umum pengadilan, visi misi, keadaan perkara, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, serta Pengawasan.

Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat nyata yang dapat diberikan PN Ketapang kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta media evaluasi untuk menilai kinerja aparaturnya PN Ketapang.

Ketapang, 12 Januari 2023

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang



KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

1. DJAILANI, S.H. 1968 – 1974
2. PARMAN SUPARMAN, S.H. 1974 – 1978
3. SALEH AMBRUWARU, S.H. 1978 – 1983
4. WARDIJONO, S.H. 1983 – 1987
5. AJITRA SARAGIH SIMARMATA, S.H. 1987 – 1993
6. M.A.D. SABANTALANDINGUN, S.H. 1993 – 1996
7. CHADIKUM ALI UTOMO, S.H. 1996 – 1998
8. ANANG ARIFIN, S.H. 1998 – 2000
9. TIGOR MANULANG, S.H., M.H. 2000 – 2004
10. PARULIAN SARAGIH, S.H., M.H. 2004 – 2007
11. BESTMAN SIMARMATA, S.H. 2007 – 2010
12. BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H. 2010 – 2012
13. MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H. 2012 – 2014
14. ACHMAD RIFAI, S.H., M.H. 2014 – 2015
15. H. MASLIKAN, S.H. 2015 – 2018
16. IWAN WARDHANA, S.H. 2018 – 2020
17. SAMUEL GINTING, S.H., M.H. 2020 – 2022
18. EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. 2022 – Sekarang



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II KEADAAN PERKARA	8
A. Keadaan Perkara di PN Ketapang	9
B. Penyelesaian Perkara	10
1. Perkara Pidana	10
2. Perkara Perdata	11
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	
1. Posbakum	13
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	13
3. Perkara Prodeo	13
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	14
1. Mutasi	19
2. Promosi	20
3. Pensiun	21
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)	21
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	24
A. Pengelolaan Keuangan	25
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	27
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	30
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	32
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	33
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	34
3. Inovasi Pelayanan Publik	35
BAB IV PENGAWASAN	36
A. Internal	37
B. Evaluasi	38
BAB V PENUTUP	39
A. Kesimpulan	40
B. Rekomendasi	40



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

[Bab ini menjelaskan dan menggambarkan secara singkat kegiatan dan capaian kerja Pengadilan Negeri Ketapang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (2023)]





Pengadilan Negeri Ketapang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

Dari sisi regulasi, untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga Peradilan guna mencegah atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh Aparatur Pengadilan, Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada erlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan merupakan salah satu langkah nyata Mahkamah Agung RI untuk melakukan penataan ulang organisasi dan tatarkerja peradilan secara umum pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya guna meningkatkan dan penguatan kelembagaan peradilan, memanajemen sumber daya manusia, dan meningkatkan produktifitas dan kinerja badan peradilan.

Dengan terjadinya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka terjadi beberapa perubahan terkait Program dan Rencana Kerja, Tugas dan Fungsi, Standar Operasional Dibawahnya, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Untuk menjawab dinamika perubahan tersebut Pengadilan Negeri Ketapang selama rentang waktu Tahun 2023 telah berusaha dan bekerja keras untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Untuk itu Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagai salah satu pelaporan administratif di lingkungan instansi pemerintah. Hal lain yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban adminsitratif adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), Sasaran Kerja, Perjanjian Kerja, Indikator Kinerja, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja yang perlu segera ditindaklanjuti secara kolektif terhadap dinamika adminsitratif di lingkungan peradilan umum.



Dalam rentang waktu selama Tahun 2023, telah terjadi beberapa perubahan dan perbaikan serta kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ketapang, antara lain:

1. Penggunaan Gedung Kantor yang telah direnovasi yang digunakan sejak April 2016;
2. Penggunaan Server SIPP terbaru dan perangkat jaringan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi pelayanan kepada masyarakat secara Cepat, Akurat, Kreatif, Efektif, dan Profesional sesuai motto PN Ketapang (CAKEP);
4. Meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja baik pada penyelesaian perkara maupun pada administrasi perkara dan administrasi umum;
5. Perbaikan website Pengadilan Negeri Ketapang, www.pn-ketapang.go.id;
6. Penggunaan email resmi Pengadilan Negeri Ketapang, info@pn-ketapang.go.id;
7. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Ketapang;
8. Mengaktifkan meja informasi dan meja pengaduan sesuai arahan Dirjen Badan Peradilan Umum;
9. Menciptakan Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
10. Menciptakan Ruang Tamu Terbuka;
11. Menciptakan Kawasan Zona Bebas Asap Rokok;
12. Sarana dan Prasarana *Teleconfrence* dan Pemanfaatannya pada Persidangan Anak;
13. Penggunaan fasilitas Pengumuman / Pemanggilan Sidang melalui *Sound System* yang terintegrasi;
14. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
15. Sertifikasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Predikat A “Excellent”;
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis Teknologi Informasi;
17. Pelayanan berbasis Media Sosial seperti Whatsapp Center, Instagram, dan Facebook.

Demikian gambaran umum tentang kegiatan Pengadilan Negeri Ketapang dalam kurun waktu Tahun 2023.



BAB II

KEADAAN PERKARA



BAB II

KEADAAN PERKARA

[Bab ini menjelaskan tentang
Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Negeri Ketapang
dalam menyelesaikan perkara
tahun 2023]





A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI KETAPANG

I. PERKARA PIDANA

Rekapitulasi Global Perkara Pidana Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Pidana Biasa	130	648	778	687	91
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	112	112	112	0
4.	Pidana Lalu Lintas	0	62	62	62	0
5.	Pidana Khusus Anak	0	18	18	18	0
6.	Praperadilan	0	3	3	3	0
7.	Pidana Perikanan	0	0	0	0	0
8.	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
Jumlah		130	843	973	882	91

II. PERKARA PERDATA

Rekapitulasi Global Perkara Perdata Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Perdata Gugatan	9	46	55	44	11
2.	Perdata Permohonan	0	56	56	53	3
3.	Gugatan Sederhana	0	5	5	2	0
4.	Perlawanan (derden verzet)	0	0	0	0	0
5.	Niaga	0	0	0	0	0
6.	PHI	0	0	0	0	0
Jumlah		9	107	116	99	14



B. PENYELESAIAN PERKARA

I. PERKARA PIDANA

Penyelesaian Perkara Pidana dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Putus 2023	Putus Tepat Waktu
1.	Pidana Biasa	687	687
2.	Pidana Singkat	0	0
3.	Pidana Cepat	112	112
4.	Pidana Lalu Lintas	62	62
5.	Pidana Khusus Anak	18	18
6.	Praperadilan	3	3
7.	Pidana Perikanan	0	0
8.	Tindak Pidana Korupsi	0	0
Jumlah		882	882

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum **Banding** sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Mengajukan	Tidak Mengajukan
1.	Pidana Biasa	687	149	538
2.	Pidana Khusus Anak	18	1	17
Jumlah		705	150	555

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum **Kasasi** sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Mengajukan	Tidak Mengajukan
1.	Pidana Biasa	687	91	596
2.	Pidana Khusus Anak	18	0	0
Jumlah		705	91	596



Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum **Peninjauan Kembali** (PK) sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Mengajukan	Tidak Mengajukan
1.	Pidana Biasa	687	17	670
2.	Pidana Khusus Anak	18	0	18
Jumlah		705	17	688

Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi sebagai berikut :

No Urut	No Diversi	Tanggal diterima Permohonan	Nama Pemohon	a. Nomor Register Penyidik b. Nomor Register PU c. Nomor Perkara PN	Anak	Tanggal Kesepakatan	Tanggal Pelaksanaan Diversi	Template Kesepakatan Diversi	Link
1	1/Pen.Div/2019/PN Ktp ja5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ktp	08 Apr. 2019	Hakim:	5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ktp	1. ANDI DARTO APING bin ASUN alm	12 Apr. 2019	28 Jan. 2020	Cetak	[detail]
2	8/Pen.Div/2018/PN Ktp	03 Apr. 2018	Penuntut Umum:	8/476/Q.1.13/Euh.2/03/2018	10. BENDI SATHIA alias BENDI bin SOPHAN	22 Mar. 2018	03 Apr. 2018	Cetak	[detail]
3	7/Pen.Div/2018/PN Ktp	29 Mar. 2018	Penyidik: ANDRY SIMANJUNTAK	8/172/III/2018/Reskrim	9. PETRUS KIMIN alias KIMIN anak laki laki dari ADIYAKO	01 Feb. 2018	29 Mar. 2018	Cetak	[detail]
4	5/Pen.Div/2018/PN Ktp.	14 Mar. 2018	Penyidik: SULASMI	8/151/II/2018/Reskrim	5. IVAN LESMANA alias IVAN bin HERMAN	29 Jan. 2018	12 Mar. 2018	Cetak	[detail]
5	6/Pen.Div/2018/PN Ktp	14 Mar. 2018	Penyidik: BAMBANG PRIHONOR	8/21/III/2018/Reskrim-PPA	6. HENCKI RONALDI bin YUSUF 7. PERI WAHYUDI bin MULYADI 8. MUHAMMAD SYARIANTO bin SAIRIN	30 Jan. 2018	14 Mar. 2018	Cetak	[detail]
6	4/Pen.Div/2018/PN Ktp	20 Feb. 2018	Penyidik: IRWAN ZAHEDI	8/09/II/2018/Reskrim	4. PETRUS RINDI anak dari MARKUS SEMBILAN	12 Feb. 2018	20 Feb. 2018	Cetak	[detail]
7	3/Pen.Div/2018/PN Ktp	12 Feb. 2018	Penyidik: ANDRY SIMANJUNTAK	8/71/II/2018/Reskrim-1	3. ANDI bin KISUT alm	15 Des. 2017	12 Feb. 2018	Cetak	[detail]
8	2/Pen.Div/2018/PN Ktp	01 Feb. 2018	Penyidik: ARI SUDANA	8/46/II/2018/Reskrim	2. RIDWAN SETIAWAN alias ERIK bin SYAHRAN ABDULLAH	30 Jan. 2018	01 Feb. 2018	Cetak	[detail]

II. PERKARA PERDATA

Penyelesaian Perkara Pidana dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Putus 2023	Putus Tepat Waktu
1.	Perdata Gugatan	44	44
2.	Perdata Permohonan	53	53
3.	Gugatan Sederhana	2	2
4.	Perlawanan (derden verzet)	0	0
5.	Niaga	0	0
6.	PHI	0	0
Jumlah		99	99



Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum **Banding** sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Mengajukan	Tidak Mengajukan
1.	Perdata Gugatan	44	9	35
Jumlah		44	9	35

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum **Kasasi** sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Mengajukan	Tidak Mengajukan
1.	Perdata Gugatan	44	4	40
Jumlah		44	4	40

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum **Peninjauan Kembali** (PK) sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Mengajukan	Tidak Mengajukan
1.	Perdata Gugatan	44	2	42
Jumlah		44	2	42

Jumlah penyelesaian perkara perdata permohonan **Eksekusi** adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2022 yang belum dilaksanakan : 3 Perkara
- Masuk tahun ini : 40 Perkara
- Dilaksanakan tahun ini / dicabut : - Perkara
- Eksekusi Sukarela : 3 Perkara
- Sisa tahun 2023 belum dilaksanakan : 40 Perkara



C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

I. POSBAKUM

Pada tahun 2023, pelaksanaan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Ketapang dilaksanakan bekerja sama dengan LBH Borneo Tanjungpura Indonesia, yang perjanjian kerjasamanya ditandatangani pada 4 Januari 2023, dengan biaya yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.03.2.099242/2023 sebesar Rp 31.200.000,00 dengan realisasi Anggaran sebesar 100 % (seratus persen).

II. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Berdasarkan DIPA Pengadilan Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005.03.2.099242/2023, Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang tidak memiliki alokasi anggaran untuk Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.

III. PERKARA PRODEO

Berdasarkan DIPA Pengadilan Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005.03.2.099242/2023, Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang tidak memiliki alokasi anggaran untuk Perkara Prodeo.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

[Bab ini menerangkan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Ketapang, baik Mutasi, Promosi, Pensiun, dan Diklat pada Pengadilan Negeri Ketapang selama Tahun 2023]





KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, baik dalam hal mutasi, promosi, pensiun dan diklat (SDM teknis / non teknis) pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

No	Nama	Jabatan	Gol	Pend
1	EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.	<i>Ketua PN-Ketapang</i>	IV/a	S2
2	NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H.	<i>Wakil Ketua PN-Ketapang</i>	IV/a	S2
3	ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S2
4	IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S2
5	AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S2
6	BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S1
7	ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S1
8	JOSUA NATANAEL, S.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S1
9	DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S1
10	KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S2
11	ANUNG HANDONO, S.H.	<i>Panitera</i>	III/d	S1
12	BUDIONO	<i>Sekretaris</i>	III/d	SMA
13	ISKANDAR M.Y	<i>Panitera Muda Pidana</i>	III/c	SMA
14	SEDIYAN	<i>Panitera Muda Perdata</i>	III/b	SMA
15	LENI HERMANANINGSIH, S.H.	<i>Panitera Muda Hukum</i>	III/c	S1
16	SARJONO	<i>Kasubbag Umum dan Keuangan</i>	III/c	SMA
17	IIP MURDHIANSYAH, S.H.	<i>Kasubbag Kepegawaian, Ortala</i>	III/c	S1
18	RAHMAD DODONG JUNAIDI MS, S.H.	<i>Plt. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan</i>	III/b	S1
19	MUHAMMAD HARIYANDI	<i>Panitera Pengganti</i>	III/c	SMA
20	SARI ASIH ANDAYANI	<i>Jurusita</i>	III/b	SMA
21	UTOMO, S.M.	<i>Jurusita</i>	III/a	S1
22	AQUARI PEBLESA, S.M.	<i>Jurusita</i>	III/a	S1
23	FARIDA SALEH	<i>Jurusita</i>	II/d	SMA
24	RIO RINALDI SILALAH, S.H.	<i>Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana</i>	III/a	S1
25	INDAH PUJI ASTUTI UTAMI, S.H.	<i>Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum</i>	III/a	S1



26	DEDY MIRWAN	<i>Pengelola Sistem dan Jaringan</i>	II/d	SMA
27	NOLA MELIA OVI BERLIANTI, A.Md.Kom.	<i>Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Perdata</i>	II/c	D3
28	SARAH SAYYIDATUN NAFISA, A.Md.M.	<i>Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana</i>	II/c	D3
29	STEPANUS LIDO SINAMBELA	<i>Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Pidana</i>	II/b	SMA
30	ALIUDIN	<i>Pengadministrasi Umum, Sub Bagian Umum Dan Keuangan</i>	II/a	SMA
31	Haidir Susanto	<i>Juru Sita Pengganti</i>	II/c	SMA

Daftar Pegawai Tenaga Teknis Pengadilan Negeri Ketapang :

No.	NAMA	PANGKAT / RUANG GOL	JABATAN
1	EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. 19771001 200312 1 001	Pembina (IV/a) 1 April 2020 - 1 April 2024	Ketua Pengadilan Negeri 15 Februari 2022
2	NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H. 19800908 200312 1 001	Pembina (IV/a) 1 April 2021 - 1 April 2025	Wakil Ketua Pengadilan Negeri 22 April 2022
3	ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. 19880311 201712 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 Oct 2021 - 1 Oct 2025	Hakim 23 April 2020
4	IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H. 19890326 201712 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 Oct 2021 - 1 Oct 2025	Hakim 23 April 2020
5	AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H. 19910118 201712 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 Oct 2021 - 1 Oct 2025	Hakim 23 April 2020
6	BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H. 19910630 201712 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 April 2022 - 1 April 2026	Hakim 23 April 2020
7	ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H. 19920328 201712 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 April 2022 - 1 April 2026	Hakim 23 April 2020



8	JOSUA NATANAEL, S.H. 19940612 201712 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 April 2022 – 1 April 2026	Hakim 23 April 2020
9	DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. 19950321 201712 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 April 2022 – 1 April 2026	Hakim 27 Agustus 2020
10	ANUNG HANDONO, S.H. 197303221993031003	Penata Tk. I (III/d) 1 Oct 2014 – 1 Oct 2018	Panitera 21 Desember 2022
11	LENI HERMANANINGSIH, S.H. 19831106 201101 2 010	Penata (III/d) 1 April 2019 – 1 April 2023	Panitera Muda Hukum 26 April 2022
12	ISKANDAR M.Y 19720304 199303 1 003	Penata (III/c) 1 April 2022 – 1 April 2026	Panitera Muda Pidana 14 November 2022
13	SEDIYAN 19670714 199203 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 April 2013 – 1 April 2017	Panitera Muda Perdata 1 Maret 2019
14	MUHAMMAD HARIYANDI 19660206 199403 1 002	Penata (III/c) 1 April 2018 – 1 April 2022	Panitera Pengganti 30 Oct 2007
15	IIP MURDHIANSYAH, S.H. 19851215 201403 1 002	Penata (III/c) 1 April 2022 – 1 April 2026	Panitera Pengganti 3 Februari 2023
16	SARI ASIH ANDAYANI 19700418 199203 2 005	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 April 2013 – 1 April 2017	Jurusita 1 Agustus 2002
17	UTOMO, S.M. 19821124 200904 1 005	Penata Muda (III/a) 1 April 2021 – 1 April 2025	Jurusita 27 Mei 2016
18	AQUARI PEBLESA, S.M. 19870207 200912 1 005	Penata Muda (III/a) 1 April 2020 – 1 April 2024	Jurusita 26 Oktober 2021
19	FARIDA SALEH 19880927 200912 2 002	Pengatur Tk. I (II/d) 1 April 2022 – 1 April 2026	Jurusita 16 Februari 2016



20	Haidir Susanto 19700510 199103 1 005	Pengatur (II/c) 1 Oct 2022 - 1 Oct 2026	Jurusita Pengganti 20 April 2009
----	---	---	--

Daftar Pegawai Tenaga Non Teknis Pengadilan Negeri Ketapang :

No	NAMA	PANGKAT/ RUANG GOLONGAN	JABATAN
1	BUDIONO 19680909 199003 1 002	Penata Tk. I (III/d) 1 April 2021 - 1 April 2025	Sekretaris 29 Desember 2015
2	SARJONO 19740722 199403 1 003	Penata (III/c) 1 April 2017 - 1 April 2021	Kasubbag Umum Keuangan 29 Desember 2015
3	RAHMAD DODONG JUNAIDI MS, S.H. 19770319 200112 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b) 1 April 2020 - 1 April 2024	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
4	INDAH PUJI ASTUTI UTAMI, S.H. 19940414 202012 2 001	Penata Muda (III/a) 1 Desember 2020 - 1 April 2025	Analisis Perkara Peradilan 1 Februari 2021
5	RIO RINALDI SILALAH, S.H. 19940316 202203 1 003	Penata Muda (III/a) 1 Maret 2022 - 1 April 2026	Analisis Perkara Peradilan 1 Maret 2022
6	DEDY MIRWAN 19880806 200801 1 001	Pengatur Tk. I (II/d) 1 April 2020 - 1 April 2024	Pengelola Sistem dan Jaringan 1 November 2022
7	NOLA MELIA OVI BERLIANTI, A.Md.Kom 19951016 202012 2 009	Pengatur (II/c) 1 Desember 2020 - 1 April 2024	Pengelola Perkara 3 Februari 2023
8	SARAH SAYYIDATUN NAFISA, A.Md.M. 19991002 202203 2 007	Pengatur (II/c) 1 Maret 2022 - 1 Maret 2026	Pengelola Perkara 1 Maret 2022
9	STEPANUS LIDO SINAMBELA 19820904 201408 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 Oct 2018 - 1 Oct 2022	Pengadministrasi Registrasi 10 Juni 2020
10	ALIUDIN 19760210 201212 1 002	Pengatur Muda (II/a) 1 April 2020 - 1 April 2024	Pengadministrasi Umum 4 Januari 2021



Berikut daftar tenaga kontrak pada Pengadilan Negeri Ketapang:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	TOROS ZULKARNAIN	Satpam - Malam	
2	RADIANSYAH	Satpam – Siang	
3	NANDI FIRDIANSYAH	Pengemudi	
4	FATIMAH, A.Md. Kom	Pramubhakti	
5	SUDIRMAN	Pramubhakti	

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Negeri Ketapang berjumlah 36 orang dengan rincian 10 Orang Hakim, 21 Orang Pegawai dan 5 Orang Honorer, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Ketua Pengadilan Negeri	1 orang
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	1 orang
3	Hakim	8 orang
4	Panitera	1 orang
5	Sekretaris	1 orang
6	Panitera Muda	3 orang
7	Kepala Sub Bagian	2 orang
8	Panitera Pengganti	2 orang
9	Jurusita	4 orang
10	Jurusita Pengganti	2 orang
11	Staf	6 orang
12	Honorer	5 orang

A. MUTASI

Selama tahun 2023 mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Ketapang adalah sebagai berikut:

Hakim dan Pegawai Mutasi **keluar** dari PN Ketapang

- a. Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H. berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah agung ri Nomor : 1796/DJU/SK.KP.1.3/XI/2023 Tanggal 6 Nopember 2023 menjadi Ketua Pengadilan Negeri Donggala.
- b. Mutasi Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ANUNG HANDONO, S.H. berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum Nomor : 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 menjadi Panitera Pengadilan Negeri Sampit.



Hakim dan Pegawai Mutasi **masuk** dari PN Ketapang

- a. KUNTI KALMA SYITA, S.H.,M.H. berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum Nomor : 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dimutasikan dari hakim Pratama Muda pengadilan negeri kuala kurun menjadi Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Ketapang
- b. YANTO ARIYANTO, S.H.,M.H. berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ri Nomor : 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 Tanggal 6 Nopember 2023 dimutasikan dari hakim madya pratama pengadilan negeri indramayu menjadi hakim madya pratama /wakil ketua pengadilan negeri ketapang
- c. SYAHRIR RIZA, S.H. berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum Nomor : 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 dimutasikan dari panitera muda perdata pada pengadilan negeri Pontianak menjadi Panitera Pengadilan Negeri Ketapang.

B. PROMOSI

Selama tahun 2023 promosi yang terjadi di Pengadilan Negeri Ketapang adalah sebagai berikut:

- a. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H. berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah agung ri Nomor : 1796/DJU/SK.KP.1.3/XI/2023 Tanggal 6 Nopember 2023 dipromosikan dan dimutasikan ke pengadilan negeri Donggala sebagai Ketua PN. Donggala Kelas II.
- b. ANUNG HANDONO, S.H. berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum Nomor : 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 dipromosikan dan dimutasikan ke pengadilan negeri sampit menjadi Panitera Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB.
- c. IIP MURDHIANSYAH, S.H. . berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum Nomor : 1332/DJU/SK/KP04.5/4/2023 tanggal 17 April 2023 dipromosikan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang.
- d. FARIDA SALAH. berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum NOMOR 1332/DJU/SK/KP04.5/4/2023 tanggal 17 april 2023 dipromosikan sebagai Jurusita pada pengadilan negeri ketapang.



- e. RAHMAD DODONG JUNAIDI MS, S.H. Berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1710/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dipromosikan sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi dan tata laksana pada pengadilan negeri ketapang.
- f. LENI HERMANANINGSIH, S.H. berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum NOMOR 1811/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 dipromosikan sebagai Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Ketapang.
- g. ISKANDAR MY. berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum NOMOR 1811/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 dipromosikan sebagai Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Ketapang.
- h. STEPANUS LIDO SINAMBELA, S.H. berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan negeri ketapang Nomor : W17-U4/264/KP.04.5/2/2023 Tanggal 21 Februari 2023 dipromosikan sebagai jurusita pengganti pada pengadilan negeri ketapang

C. PENSIUN

Untuk Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang tidak terdapat pegawai yang Pensiun.

D. DIKLAT

Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang diikuti Pengadilan Negeri Ketapang dalam kurun waktu tahun 2023, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PELATIHAN/ BIMTEK	NAMA PESERTA PELATIHAN/ BIMTEK	TGL PELATIHAN	JPL	KET
1	Pelatihan Smart ASN “English Communication Skills For The Indonesia Civil Service (ECSCS)” Tahun 2023	- Bagus Raditya Wiradana, S.H.	20 s.d 24 Februari 2023	-	PN Ketapang
2	Pemanggilan Peserta Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE I) Peradilan Umum Seluruh Indonesia	- Andre Budiman Panjaitan, S.H - Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	05 s.d 11 Februari 2023	-	Badan Litbang Kumdil MA RI



3	Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia.	- Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	26 Maret s.d. 1 April 2023	-	Badan Litbang Kumdil MA RI
4	Pemanggilan peserta uji kompetensi pengadaan / jasa pemerintahan wilayah Kalimantan barat angkatan I kerjasama Badan litbang DiklatKumdil MARI dengan BPSDM Prov. Kalimantan	- Dedy Mirwan - Sarah Sayyidatun Nafisa, A.Md.M.	24 s.d 28 Mei 2023	-	BPSDM Kalbar
5	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH	- Aldilla Ananta, S.H.,M.H - Josua Natanael, S.H	05 s.d 09 Juli 2023	-	Komisi Yudisial TA 2023
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoraktif di lingkungan peradilan Umum MA-RI Tahun 2023	- Ega Shaktiana, S.H., M.H. - Andre Budiman Panjaitan, S.H - Bagus Raditya Wiradana, S.H. - Ika Ratna Utami, S.H.,M.H - Aldilla Ananta, S.H.,M.H - Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. - Anung Handono, S.H	23 s.d 25 Agustus 2023	-	Hotel Golden Tulip Pontianak
7	Kegiatan Inventarisasi Data BMN Wilayah Kalimantan Barat.	- Budiono - Sarjono - Nia Shara	5 September 2023 s.d. Jumat, 8 September 2023	-	Hotel Alimoer, Jl. Arteri Supadio, Kuburaya
8	Menghadiri Pemanggilan Peserta Teknis Yudisial Jurusita dan Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	- Aquari Peblesa, S.M. - Farida Saleh	1 s.d 7 Oktober 2023	-	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
9	Pemanggilan Peserta Uji Kelayakan dan Kepatan bagi Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.A K, I.A dan I.B di Lingkungan Direktorat	- Anung Handono, S.H.	29 September 2023 s/d 05 Oktober 2023	-	PN Ketapang



	Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.				
10	Pemanggilan Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran Batch Kelima.	- Sarah Sayyidatun Nafisa, A.Md.M.	26 s.d 29 November 2023	-	Hotel Aryaduta Menteng Jl. Prajurit KKO Usman Harun No. 44-46, Gambir, Jakarta Pusat.
11	Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimtek Rencana Program dan Anggaran Satuan Kerja Peradilan Umum Se-Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2023	- Budiono - Dedy Mirwan	04 s.d 06 Desember 2023		Hotel Ibis Pontianak City Center



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI



BAB IV
PENGELOLAAN
KEUANGAN, SARANA DAN
PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
[Bab ini menerangkan
Keuangan, Sarana dan
Prasarana serta Teknologi
Informasi di Pengadilan
Negeri Ketapang tahun
selama 2023]





A. PENGELOLAAN KEUANGAN

DIPA 01

URAIAN		2023			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1		2	4	5	6
A. Pendapatan Negara Dan Hibah		0,	0,	0,	0
I. Pendapatan Perpajakan		0,	0,	0,	0
1. Pajak Dalam Negeri		0,	0,	0,	0
2. Pajak Perdagangan Internasional		0,	0,	0,	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		5.018.000,	22.730.505,	17.712.505,	453
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0,	0,	0,	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0,	0,	0,	0
3. Pendapatan BLU		0,	0,	0,	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		5.018.000,	22.730.505,	17.712.505,	453
III. Pendapatan Hibah		0,	0,	0,	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		5.018.000,	22.730.505,	17.712.505,	453
B. Belanja Negara		0,	0,	0,	0
I. Belanja Pemerintah Pusat		4.620.847.000,	4.601.463.239,	(19.383.761,)	100
1. Belanja Pegawai		3.564.300.000,	3.558.562.484,	(5.737.516,)	100
2. Belanja Barang		1.056.547.000,	1.042.900.755,	(13.646.245,)	99
3. Belanja Modal		0,	0,	0,	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0,	0,	0,	0
5. Belanja Subsidi		0,	0,	0,	0
6. Belanja Hibah		0,	0,	0,	0
7. Belanja Bantuan Sosial		0,	0,	0,	0
8. Belanja Lain-lain		0,	0,	0,	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa		0,	0,	0,	0
1. Transfer ke Daerah		0,	0,	0,	0
a. Dana Perimbangan		0,	0,	0,	0
1. Dana Transfer Umum		0,	0,	0,	0
a. Dana Bagi Hasil		0,	0,	0,	0
b. Dana Alokasi Umum		0,	0,	0,	0
2. Dana Transfer Khusus		0,	0,	0,	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik		0,	0,	0,	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0,	0,	0,	0
b. Dana Insentif Daerah		0,	0,	0,	0
c. Dana Keistimewaan DIY		0,	0,	0,	0
d. Dana Otonomi Khusus		0,	0,	0,	0
2. Dana Desa		0,	0,	0,	0
3. Hibah Kepada Daerah		0,	0,	0,	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		4.620.847.000,	4.601.463.239,	(19.383.761,)	100
C. PEMBIAYAAN		0,	0,	0,	0



DIPA 03

URAIAN		2023			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0,	0,	0,	0	
I. Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	0	
1. Pajak Dalam Negeri	0,	0,	0,	0	
2. Pajak Perdagangan Internasional	0,	0,	0,	0	
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	38.613.000,	59.696.000,	21.083.000,	155	
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,	0	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0,	0,	0,	0	
3. Pendapatan BLU	0,	0,	0,	0	
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	38.613.000,	59.696.000,	21.083.000,	155	
III. Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	38.613.000,	59.696.000,	21.083.000,	155	
B. Belanja Negara	0,	0,	0,	0	
I. Belanja Pemerintah Pusat	100.200.000,	87.531.880,	(12.668.120,)	87	
1. Belanja Pegawai	0,	0,	0,	0	
2. Belanja Barang	100.200.000,	87.531.880,	(12.668.120,)	87	
3. Belanja Modal	0,	0,	0,	0	
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0,	0,	0,	0	
5. Belanja Subsidi	0,	0,	0,	0	
6. Belanja Hibah	0,	0,	0,	0	
7. Belanja Bantuan Sosial	0,	0,	0,	0	
8. Belanja Lain-lain	0,	0,	0,	0	
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,	0,	0,	0	
1. Transfer ke Daerah	0,	0,	0,	0	
a. Dana Perimbangan	0,	0,	0,	0	
1. Dana Transfer Umum	0,	0,	0,	0	
a. Dana Bagi Hasil	0,	0,	0,	0	
b. Dana Alokasi Umum	0,	0,	0,	0	
2. Dana Transfer Khusus	0,	0,	0,	0	
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0,	0,	0,	0	
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,	0,	0,	0	
b. Dana Insentif Daerah	0,	0,	0,	0	
c. Dana Keistimewaan DIY	0,	0,	0,	0	
d. Dana Otonomi Khusus	0,	0,	0,	0	
2. Dana Desa	0,	0,	0,	0	
3. Hibah Kepada Daerah	0,	0,	0,	0	
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	100.200.000,	87.531.880,	(12.668.120,)	87	
C. PEMBIAYAAN	0,	0,	0,	0	



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Ketapang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
I	Ruang Kerja		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	2	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Mediasi / Diversi	1	
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
12	Ruang Pejabat Fungsional (PP dan JS)	2	
13	Ruang Subbagian Umum dan Keuangan	1	
14	Ruang Subbagian Keportala	1	
15	Ruang Subbagian PTIP	1	
16	Ruang Server, CCTV dan PABX	1	
17	Ruang Arsip	1	
18	Ruang Perpustakaan	1	
19	Ruang Rapat Umum	1	
20	Ruang Rapat Pimpinan	1	
21	Ruang Tunggu Penuntut Umum	1	
22	Ruang Tunggu Penasihat Hukum	1	
23	Ruang Tunggu Persidangan	3	
24	Ruang Tunggu Anak - Bermain Anak	1	
25	Ruang Ibu Menyusui	1	
26	Ruang Media Center	1	
27	Ruang Teleconference	1	
28	Ruang Kesehatan	1	
29	Ruang Mushola	1	
30	Ruang Tahanan	3	
31	Ruang Barang Bukti	1	
32	Ruang Genset	1	
33	Gudang	2	
II	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer - PC Unit	9	
2	Komputer - Server	2	
3	Komputer - Laptop	20	



4	Printer	9	
5	Scanner	3	
6	UPS	2	
7	Router	1	
8	CCTV	12	
9	Finger Print	1	
10	TV Led	1	
11	PABX	1	
12	Faximile	1	
13	Telepon	1	
14	AC Split	20	
15	Meja Persidangan	15	
16	Kursi Persidangan	21	
17	Kursi Pengunjung Sidang	40	
18	Meja Kerja	40	
19	Kursi Kerja	40	
20	Lemari Dokumen	23	
21	Lemari Toga	8	
22	Filling Cabinet	6	
21	Meja Rapat/Lainnya	4	
22	Kursi Rapat/Lainnya	22	
25	Meja PTSP, Informasi/ Pengaduan, Satpam,	3	

Zitting Plaatz Pengadilan Negeri Ketapang :

No	Alamat	Luas	Tahun	Sertifikat
1.	Kec Telok Melano	1.161/187	1974/1975	SHM Nomor 9
2.	Kec Sukadana	1.500/187	1980/1981	SHM Nomor 17
3.	Kec Kendawangan	1.500/187	1980/1981	SHM Nomor 35
4.	Kec Tumbang Titi	1.400/187	1980/1981	SHM Nomor 18

Rumah Dinas Jabatan Pengadilan Negeri Ketapang :

No	Unit	Peruntukan	Alamat	Luas B/T (M ²)	Tipe	Tahun Pembuatan	Sertifikat
1.	1	Ketua	Jl. Jend Sudirman No. 27	356 / 120	B	1976/1977	SHM
2.	1	Wakil Ketua	Jl. R.M. Sudiono No. 23	339 / 70	C	1988/1989	SHM
3.	1	Panitera	Jl. Ade Irma Suryani No. 5	339 / 70	C	1977/1978	SHM
4.	1	Sekretaris	Jl. Beringin Gg. Kapas	339 / 70	C	1982/1983	SHM
5.	5	Hakim	Jl. Beringin Gg. Kapas	339 / 70	C	1982/1983	SHM
6.	1	Tanah	Jl. Beringin Gg. Kapas	339	-	-	SHM



Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Ketapang :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4 (empat)					
1	Mobil Toyota Kijang Innova E	2007	√			
2	Mobil Toyota Kijang Standart	2003		√		
II	Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)					
3	Sepeda Motor Yamaha RX King	2004		√		
4	Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z	2004		√		
5	Sepeda Motor Honda Mega Pro CW	2007	√			
6	Sepeda Motor Honda Supra X 125	2005		√		
7	Sepeda Motor Honda Supra X 125	2005		√		
8	Sepeda Motor Honda Revo	2015	√			

PENGADAAN

PN Ketapang Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran untuk Belanja Modal sehingga Pengadaan Tahun 2023 tidak ada.

PEMELIHARAAN

Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan RKA-KL Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pemeliharaan Gedung Kantor, 1,150 M²
2. Pemeliharaan Halaman Kantor 200 M²
3. Pemeliharaan Jaringan (Telepon, Listrik, Internet)
4. Pemeliharaan Rumah Dinas, 9 Unit
5. Pemeliharaan Personal Computer (PC), 9 Unit
6. Pemeliharaan Laptop/Notebook, 20 Unit
7. Pemeliharaan Printer, 9 Unit
8. Pemeliharaan AC Split, 20 Unit
9. Pemeliharaan Genset, 1 Unit
10. Perawatan Kendaraan Roda 2 (Dua), 6 Unit
11. Perawatan Kendaraan Roda 4 (Empat), 2 Unit

PENGHAPUSAN

Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-134/MK.6/KNL.1101/2023 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Negeri Ketapang, Daftar Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah Dan/Atau Bangunan pada Pengadilan Negeri Ketapang yang disetujui untuk dijual :

No	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Limit Terendah	Nomor Polisi	Kondisi
1.	Sepeda Motor	Yamaha RX King	2002	8.200.000,00	7.846.000,00	KB 5719 GI	Rusak Berat
2.	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2004	8.600.000,00	961.000,00	KB 5720 GI	Rusak Berat

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Negeri Ketapang melakukan pengelolaan pengelolaan Teknologi Informasi sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Keterangan Pengelolaan
1.	Update OS Linux	Tentatif
2.	Update Aplikasi SIPP dan DB	Satu Minggu Sekali
3.	Backup Database SIPP	Setiap Hari
4.	Backup Aplikasi SIPP	Seminggu Sekali
5.	Sinkronisasi SIPP ke MA	Setiap Hari
6.	Sinkronisasi SIPP ke PT	Setiap Hari
7.	Sinkronisasi SIPP ke website	Setiap Hari
8.	Update Website	Tentatif
9.	Perawatan Jaringan	Seminggu Sekali
10.	Troubleshooting Aplikasi dan Aplikasi	Tentatif
11.	Update Aplikasi PTSP dan DB	Satu Minggu Sekali
12.	Backup Database PTSP	Setiap Hari
13.	Backup Aplikasi PTSP	Seminggu Sekali



Perangkat Keras (*Hardware*) untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi

– SIPP pada PN Ketapang tahun anggaran 2023 terdiri dari:

1. Komputer Server sebanyak 1 Unit
2. Komputer PC sebanyak 14 Unit
3. Laptop sebanyak 16 unit
4. Printer sebanyak 9 Unit
5. Printer Scanner sebanyak 2 Unit.
6. UPS sebanyak 6 Unit.
7. Router dan Jaringan Internet sebanyak 1 Set.
8. Akses Point untuk Jaringan LAN dan Internet sebanyak 5 Unit.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



BAB V

PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

Menerangkan tentang Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Inovasi Pelayanan Publik selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.



A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1970/DJU/SK/OT01.3/11/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun 2017 untuk Pengadilan Negeri Ketapang, Pengadilan Negeri Ketapang telah berhasil mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan predikat "A" (Excellent) terhitung mulai tanggal 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020. Pada prosesnya langkah-langkah yang telah dilakukan terkait pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu sebagaimana berikut:

- a. Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Ketapang, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor W17-U4/41/OT.01.1/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perubahan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Ketapang;
- b. Pelaksanaan Audit Internal yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli tiap tahunnya;
- c. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per-Triwulan yaitu pada Triwulan I bulan Januari - Maret 2023, Triwulan II bulan April -Juni 2023, Triwulan III bulan Juli - September 2023, dan Triwulan IV bulan Oktober - Desember 2023 dengan nilai sebagai berikut :

No.	Periode	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Keterangan
1.	Triwulan I	3,86 / 96,44	Sangat Memuaskan
2.	Triwulan II	3,89 / 97,22	Sangat Memuaskan
3.	Triwulan III	3,94 / 98,42	Sangat Memuaskan
4.	Triwulan IV	4,00 / 99,95	Sangat Memuaskan

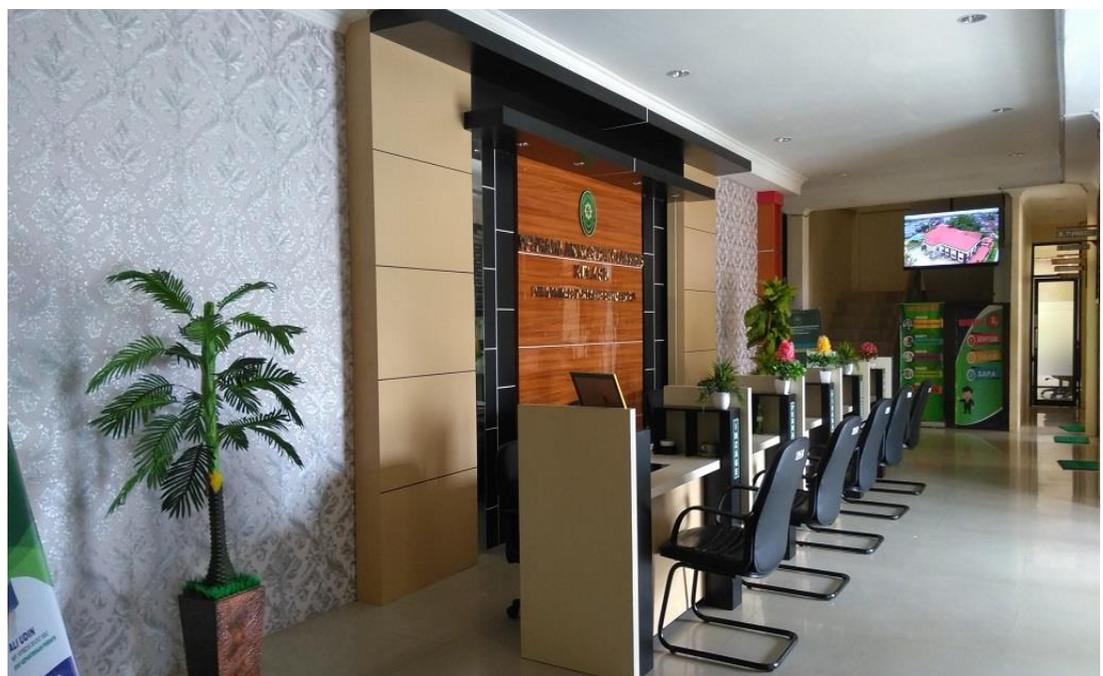
- d. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) per-Triwulan yaitu pada Triwulan I bulan Januari - Maret 2023, Triwulan II bulan April -Juni 2023, Triwulan III bulan Juli - September 2023, dan Triwulan IV bulan Oktober - Desember 2023 dengan nilai sebagai berikut :

No.	Periode	Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi	Keterangan
1.	Triwulan I	3,92 / 98,03	Sangat Memuaskan
2.	Triwulan II	3,97 / 99,27	Sangat Memuaskan
3.	Triwulan III	3,98 / 99,38	Sangat Memuaskan
4.	Triwulan IV	4,00 / 100,00	Sangat Memuaskan

- e. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen pada 13 September 2023;
 - a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap bidang/tugas;
 - b. Melaksanakan Rapat Evaluasi Bulanan dan Sosialisasi-sosialisasi seperti; pelaksanaan SOP, SAKIP, Rencana Kinerja, SKP, Cetak Biru Mahkamah Agung RI dan sosialisasi lainnya;
 - c. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi, Tim Zona Integritas, Tim Pengendali Gratifikasi;
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana guna menunjang kerja dan kinerja demi peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Ketapang telah dilaksanakan sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Nomor W17-U4/1225/OT.00/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan telah mengalami beberapa kali Perubahan dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Nomor W17-U4/169/KP.04.5/2/2023 tanggal 3 Februari 2023.





C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam hal pelayanan publik yang prima dan profesional, Pengadilan Negeri Ketapang menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang baik dan bermanfaat bagi para pencari keadilan yang datang, diantaranya yaitu :

- a. Ruang Tamu Terbuka dengan Pendingin Ruangan;
- b. Smoking Area yang Representatif;
- c. Taman terbuka terhubung dengan smoking area yang indah;
- d. Ruang Media Center;
- e. Pelayanan Prioritas kepada kaum Disabilitas;
- f. Kartu KEREN (Kartu Kelompok Rentan);
- g. Kartu Pengunjung bagi Pengunjung Pelayanan;
- h. TV Display Informasi Pengadilan;
- i. Mesin Antrian Pengunjung;
- j. Layar Monitor Antrian Pengunjung
- k. Steril Area Pengunjung dan Tamu Pengadilan;
- l. Security Access Pengadilan Negeri Ketapang;
- m. Ruang Pelayanan dengan Pendingin Ruangan;
- n. Ruang Tunggu Sidang Anak / Ruang Teleconference;
- o. Jalur Pengunjung Sidang khusus;
- p. Ruang Tunggu Sidang yang luas
- q. Parkir Area Pengunjung;
- r. Layar Komputer khusus Pengunjung di Ruang Pelayanan;
- s. Mushola yang Representatif Dengan Pendingin Ruangan;
- t. Toilet Pengunjung yang bersih;
- u. Ruang Bermain Anak;
- v. Ruang Baca/Perpustakaan;
- w. Ruang Pos Bantuan Hukum (Posbakum);

Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Ketapang, ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor W17-U4/191/OT.00/2/2023 tentang Penetapan Daftar Produk Inovasi Pelayanan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 6 Februari 2023, meliputi:

- a. Pelayanan Whatsapp Center Pengadilan;
- b. E-SOBAT Penepang (Elektronik Survey Kepuasan Optimalisasi Layanan Bagi Kelompok Rentan di Pengadilan Negeri Ketapang) yang berbentuk survey elektronik bagi kelompok rentan yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Ketapang;
- c. E-COBEL (Elektronik Court Bagi Penyandang Difabel)



BAB VI PENGAWASAN



BAB VI
PENGAWASAN
Menerangkan
Pengawasan Internal
dan Evaluasi yang
terjadi selama kurun
waktu 1 (satu) tahun
terakhir 2019.





A. INTERNAL

Pengawasan internal yang terjadi selama tahun anggaran 2023 selain yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, juga adanya pengawasan reguler dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Ketapang selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor W17-U4/32/OT.00/1/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Ketapang, pada setiap bulannya terhadap masing-masing bidang.
2. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja oleh Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 2642/KPT/ST.KP7.1/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 9 s.d. 11 November 2023 dengan tim terdiri dari:
 1. Mion Ginting, S.H., Hakim Utama PT Pontianak sebagai Ketua;
 2. Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., Hakim Utama PT Pontianak sebagai Anggota;
 3. Sawardi, S.H., M.H., Plt. Panitera PT Pontianak sebagai Anggota;
 4. A. Estelita J. Hutagalung, S.I.P. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PT Pontianak sebagai Sekretaris.

Dari hasil pengawasan, terdapat beberapa temuan *minor* yang sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Ketapang

3. Pengawasan Reguler oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 960/BP/ST.PW1.1.1/IX/2023 tanggal 22 September 2022 selama 5 (lima) hari dari tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2023 dengan tim terdiri dari:
 1. Made Suweda, Hakim Tinggi Pengawas sebagai Ketua ;
 2. Susilowati, Hakim Tinggi Pengawas sebagai Anggota;
 3. Ramon Wahyudi, Hakim Yustisial sebagai Anggota;
 4. Eko Purwanto, Kasubbag Dokumentasi dan Informasi sebagai Sekretaris;
 5. Hendra Rahmadani, Auditor Muda sebagai Anggota.



Dari hasil pengawasan, terdapat beberapa temuan *minor* yang sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Ketapang melalui Aplikasi *Wastitama*.

B. EVALUASI

Evaluasi dari hasil pengawasan reguler yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, adalah mencakup hal sebagaimana berikut:

1. Tentang Manajemen Peradilan
2. Tentang Administrasi Perkara
3. Tentang Adminitrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
4. Tentang Adminitrasi Umum
5. Tentang Kinerja Pelayanan Publik
6. Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
7. Tentang Penanganan Pengaduan

Evaluasi dari hasil pengawasan reguler yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah mencakup hal sebagaimana berikut:

1. Tentang Manajemen Peradilan
2. Tentang Pelayanan Publik
3. Tentang Adminitrasi Perkara
4. Tentang Adminitrasi Persidangan
5. Tentang Administrasi Umum



BAB VII

PENUTUP



BAB VII PENUTUP

Menyampaikan secara umum, masukan, ide, saran pendapat untuk perkembangan dunia peradilan khususnya pada Pengadilan Negeri Ketapang.





A. KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang merupakan media pertanggungjawaban dan laporan yang memberikan gambaran serta kondisi atas apa-apa yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Ketapang selama kurun waktu tahun 2023.

Jumlah Perkara Pidana yang menjadi beban penyelesaian di Pengadilan Negeri Ketapang adalah 777 Perkara dengan jumlah perkara Pidana yang Putus adalah 687 Perkara, sehingga pada Tahun 2023 ini masih menyisakan 91 Perkara Pidana yang belum Putus dan menjadi beban penyelesaian di tahun berikutnya. Sedangkan untuk jumlah perkara perdata yang menjadi beban penyelesaian di Pengadilan Negeri Ketapang adalah 116 Perkara dengan jumlah perkara Perdata yang Putus adalah 87 Perkara, sehingga pada tahun 2023 ini masih menyisakan 14 Perkara Perdata yang belum Putus dan menjadi beban penyelesaian di tahun berikutnya.

Jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Ketapang adalah 36 orang yang terdiri dari 10 Orang Hakim, 21 Orang Pegawai dan 5 Orang Honorer, dalam membantu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Ketapang dengan didukung berbagai diklat yang telah diikuti sepanjang tahun 2023 ini.

Pengadilan Negeri Ketapang terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kualitas kinerja melalui berbagai pengembangan pada sarana dan prasarana serta kualitas administratif dan inovatif yang terus dilakukan yang terbukti dari nilai hasil survey yang terus meningkat di tahun 2023. Pengawasan dan evaluasi kinerja juga telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hasil minor dan telah selesai ditindaklanjuti.

B. REKOMENDASI

Dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023, kami merekomendasikan beberapa hal:

1. Penambahan anggaran untuk peremajaan jaringan internet serta maintenance website, belanja modal, dan Uang Perjalanan Dinas.
2. Pengadaan sarana dan prasarana terutama diperlukan adanya pengadaan meubelair dan dekorasi sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan publik pada PN Ketapang.